

ANGGARAN KESEHATAN DALAM APBN

**PUSAT KAJIAN ANGGARAN
BADAN KEAHLIAN DPR RI
2016**

Anggaran Kesehatan Dalam APBN

Tim Penyusun

Penanggung Jawab

Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si.

Penulis

Slamet Widodo, S.E., M.E.

Titik Kurnianingsih, S.E., M.E.

Robby Alexander Sirait, S.E., M.E.

Martha Carolina, S.E., Ak., M. Ak.

Ade Nurul Aida, S.E.

Penyunting

Robby Alexander Sirait, S.E., M.E.

Desain Sampul

Slamet Widodo, S.E., M.E.

Cetakan Pertama, Agustus 2016

ISBN : 978-027-46611-1-1

Diterbitkan oleh

Pusat Kajian Anggaran

Badan Keahlian DPR RI

All right reserved

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

PENGANTAR
KEPALA PUSAT KAJIAN ANGGARAN
BADAN KEAHLIAN DPR RI

Puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah SWT, karena dengan rahmat dan karunia-Nya, buku Anggaran Kesehatan Dalam APBN ini dapat diterbitkan.

Kita ketahui bersama bahwa pembangunan kesehatan merupakan suatu bentuk investasi terhadap modal manusia suatu bangsa, tak terkecuali Indonesia. Investasi terhadap modal manusia ini pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia. Mengingat begitu pentingnya pembangunan kesehatan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dukungan anggaran yang bersumber dari APBN sangat dibutuhkan. Dukungan anggaran tersebut telah diatur dalam Pasal 171 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang menyebutkan besaran alokasi anggaran bidang kesehatan pemerintah minimal sebesar 5 persen (lima persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diluar gaji.

Sejak UU tersebut disahkan, pemenuhan anggaran kesehatan minimal 5 persen baru bisa diwujudkan dalam APBN Tahun Anggaran 2016. Hal ini, menjadi salah satu latar belakang yang mendasari penulisan dan penerbitan buku ini. Buku ini merupakan hasil kerja Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI yang dapat dipergunakan untuk memperkaya informasi dan memberikan gambaran ringkas tentang perkembangan alokasi anggaran kesehatan dan beberapa capaian pembangunan kesehatan di Indonesia.

Meskipun buku ini masih jauh dari sempurna dan komprehensif, buku ini diharapkan setidaknya mampu memaparkan sedikit banyak tentang perkembangan anggaran kesehatan dan hasil pembangunan kesehatan di Indonesia. Berbagai masukan dan kritikan senantiasa kami harapkan guna lebih mempertajam substansi dan isi buku-buku tentang anggaran kesehatan yang akan kami terbitkan di masa mendatang. Dan terakhir, semoga buku ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi pembaca.

Jakarta, Agustus 2016

Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si.

Daftar Isi

Pengantar Kepala Pusat Kajian Anggaran BKD DPR RI	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	vi
Daftar Gambar	viii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
BAB DUA KERANGKA KONSEPTUAL KESEHATAN	3
1. Definisi Kesehatan	3
2. Arti Penting Kesehatan	4
3. Hubungan Kesehatan dan Kemiskinan	5
4. Hubungan Kesehatan dan Pembangunan Ekonomi	9
5. Anggaran Kesehatan Perorangan Versus Anggaran Kesehatan Masyarakat	15
BAB TIGA STRUKTUR ANGGARAN KESEHATAN DALAM APBN TAHUN ANGGARAN 2016	17
1. Konsep Anggaran Kesehatan	17
2. Dasar Hukum Anggaran Kesehatan	17
3. Perhitungan Anggaran Kesehatan dalam APBN 2016	19
3.1 Pemetaan Anggaran Kesehatan Melalui Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2016	21
3.2 Pemetaan Anggaran Kesehatan Melalui Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2016	27
BAB EMPAT PERKEMBANGAN ANGGARAN KESEHATAN	39
1. Perkembangan Anggaran Kesehatan 2011-2016	39
1.1 Komposisi Anggaran Kesehatan	39
1.2 Rasio Anggaran Kesehatan terhadap Total Belanja Negara/ terhadap Total APBN	40
1.3 Rasio Anggaran Kesehatan terhadap PDB	41
2. Anggaran Kesehatan Pada Kementerian/ Lembaga	42
2.1 Kementerian Kesehatan	42
2.2 BKKBN	43
2.3 BPOM	44
3. Anggaran Kesehatan Melalui Transfer Ke Daerah	46
BAB LIMA CAPAIAN PEMBANGUNAN KESEHATAN	48
1. Mortalitas	49
2. Angka Harapan Hidup	58
3. Morbiditas	58
4. Status Gizi	61

BAB ENAM BENCHMARKING DENGAN NEGARA LAIN	64
1. Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan di Negara Eropa	64
2. Penyelenggaraan Kesehatan di ASEAN	68
2.1 Penerapan UHC dan Sumber Dana Penyelenggaraan Kesehatan	68
2.2 Belanja Kesehatan terhadap PDB	69
2.3 Penyelenggaraan Kesehatan	70
3. Perbandingan Indikator Kesehatan Dengan Negara ASEAN dan SEAR	70
3.1 Mortalitas	71
3.2 Angka Harapan Hidup	75
3.3 Morbiditas	76
3.4 Status Gizi	79
Daftar Pustaka	81

Daftar Tabel

Tabel 2.1.	Sasaran Pokok Pembangunan Sub Bidang Kesehatan Dan Gizi Masyarakat RPJMN 2015-2019	13
Tabel 3.1.	Anggaran Kesehatan Tahun 2016	21
Tabel 3.2.	Pemetaan Anggaran Kesehatan Melalui Pemerintah Pusat ..	21
Tabel 3.3.	Anggaran Kesehatan di Kementerian Kesehatan Menurut Program (triliun Rp)	22
Tabel 3.4.	Indikator dan Target Program Penguatan Pelaksanaan JKN.	22
Tabel 3.5.	Indikator dan Target Program Bina Gizi Dan Kesehatan Ibu Dan Anak	23
Tabel 3.6.	Indikator dan Target Program Pembinaan Upaya Kesehatan	23
Tabel 3.7.	Indikator dan Target Program Pengendalian Penyakit Dan Penyehatan Lingkungan	24
Tabel 3.8.	Indikator dan Target Program Kefarmasian Dan Alat Kesehatan	24
Tabel 3.9.	Indikator dan Target Program Pengembangan Dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK)	25
Tabel 3.10.	Anggaran Kesehatan di BKKBN Menurut Program (triliun Rp)	25
Tabel 3.11.	Indikator dan Target Program Kependudukan KB, dan Pembangunan Keluarga	26
Tabel 3.12.	Anggaran Kesehatan di BPOM Menurut Program (triliun Rp)	26
Tabel 3.13.	Indikator dan Target Program Pengawasan Obat dan Makanan	27
Tabel 3.14.	Alokasi DAK Fisik (triliun Rp)	31
Tabel 3.15.	Ruang Lingkup DAK Fisik Tahun 2016	32
Tabel 3.16.	Alokasi DAK Non Fisik (miliar Rp)	34
Tabel 3.17.	Ruang Lingkup Non DAK Fisik Tahun 2016	34
Tabel 4.1.	Anggaran Kesehatan Tahun 2011-2016 (triliun Rp)	39
Tabel 4.2.	Rincian Anggaran Kesehatan Tahun 2011-2016 (triliun Rp)	40
Tabel 4.3.	Realisasi Anggaran Kementerian Kesehatan Tahun 2010-2015 (miliar Rp)	43
Tabel 4.4.	Realisasi Anggaran BKKBN Tahun 2010 - 2015 (miliar Rp) .	44
Tabel 4.5.	Realisasi Anggaran BKKBN Tahun 2010 - 2015 (miliar Rp) .	46
Tabel 5.1.	Status Beberapa Penyakit Menular dan Tidak Menular	60
Tabel 5.2.	Status Beberapa Penyakit Menular dan Tidak Menular	62
Tabel 5.3.	Kasus Gizi Buruk Pada Balita Ditemukan dan Mendapat Perawatan Menurut Provinsi Tahun 2014	63
Tabel 6.1.	Garis Besar Penyelenggaraan Kesehatan di Beberapa Negara Eropa	65
Tabel 6.2.	Proporsi Sumber Dana Penyelenggaraan Kesehatan di	

	Beberapa Negara Eropa	66
Tabel 6.3.	Proporsi Sumber Dana Penyelenggaraan Kesehatan di Negara ASEAN	69
Tabel 6.4.	Penyelenggaraan Kesehatan Berbagai Negara di Asia Tenggara	70
Tabel 6.5.	Perkembangan Jumlah Kasus Polio di Negara ASEAN dan SEAR Tahun 2005-2014	78
Tabel 6.6.	Jumlah Kasus Penyakit Campak di Negara ASEAN dan SEAR Tahun 2015	79
Tabel 6.7.	Prevalansi Balita Menurut Status Gizi di Negara ASEAN dan SEAR Tahun 2009-2013	80

Daftar Gambar

Gambar 2.1.	Hubungan Kemiskinan dan Kesehatan	6
Gambar 2.2.	Hubungan Kesehatan dan Pembangunan Nasional	12
Gambar 2.3.	Program Indonesia Sehat	15
Gambar 3.1.	Perhitungan Anggaran Kesehatan dalam APBN	20
Gambar 3.2.	Tahapan Proposal Based DAK	28
Gambar 3.3.	Alur Alokasi dan Penyaluran DAK Fisik Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana	35
Gambar 3.4.	Tahapan Penyaluran DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB Tahun 2016	36
Gambar 3.5.	Tahapan Penyaluran DAK Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun 2016	36
Gambar 3.6.	Tahapan Penyaluran DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB Tahun 2016	37
Gambar 3.7.	Tahapan Penyaluran Dana Otonomi Khusus	38
Gambar 4.1.	Rasio Anggaran Kesehatan Terhadap Belanja Negara dan PDB Tahun 2011 - 2016 (persentase)	41
Gambar 4.2.	Capaian dan Anggaran Kementerian Kesehatan Tahun 2010 - 2015 (miliar Rp)	43
Gambar 4.3.	Capaian dan Anggaran BKKBN Tahun 2010 - 2015 (miliar Rp)	44
Gambar 4.4.	Capaian dan Anggaran BKKBN Tahun 2010 - 2015 (miliar Rp)	45
Gambar 4.5.	Perkembangan Anggaran Kesehatan melalui Transfer ke Daerah, Tahun 2011-2015 (dalam triliun rupiah)	47
Gambar 5.1.	Estimasi Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup di Indonesia, SDKI 1991-2012	51
Gambar 5.2.	Estimasi Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup di Indonesia, SDKI 2012	52
Gambar 5.3.	Estimasi Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup di Indonesia, SDKI 1991-2012	54
Gambar 5.4.	Estimasi Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup di Indonesia, SDKI 2012	55
Gambar 5.5.	Estimasi Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup di Indonesia, SDKI 1991-2012	56
Gambar 5.6.	Estimasi Angka Kematian Ibu di Indonesia, SDKI 1991-2012	57
Gambar 5.7.	Angka Harapan Hidup Indonesia (tahun)	58
Gambar 5.8.	Kenaikan/Penurunan Beban Penyakit	61
Gambar 6.1.	Rasio Belanja Kesehatan Terhadap PDB Negara-Negara ASEAN Tahun 2014 (Persentase)	69
Gambar 6.2.	Angka Kematian Balita dan Bayi (Per 1000 Kelahiran Hidup) di Negara ASEAN dan SEAR Tahun 2015	72
Gambar 6.3.	Angka Kematian Ibu di Negara ASEAN dan SEAR Tahun	

	2015	73
Gambar 6.4.	Angka Kematian Kasar (Per 1000 Penduduk) di Negara ASEAN dan SEAR Tahun 2014	74
Gambar 6.5.	Angka Harapan Hidup di Negara ASEAN dan SEAR Tahun 2014	75
Gambar 6.6.	Insiden Tuberkulosis di Negara ASEAN dan SEAR Tahun 2014 (per 100.000 penduduk)	77

BAB SATU PENDAHULUAN

Pembangunan kesehatan pada hakekatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen Bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.

Undang-undang Dasar 1945 menjadikan kesehatan sebagai salah satu kebutuhan dan hak dasar yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Keberhasilan pembangunan kesehatan tidak hanya ditentukan oleh adanya kesinambungan antar upaya program dan sektor dari tahun ke tahun, namun juga melibatkan seluruh pemangku kepentingan mulai dari tingkat desa hingga pemerintah pusat.

Sebagai negara yang berhasil melaksanakan konsep otonomi daerah, fungsi kesehatan menjadi salah satu program yang tidak hanya menjadi urusan pemerintah, melainkan juga urusan wajib pemerintah daerah dengan berpedoman kepada standar pelayanan minimal (SPM) yang harus dipenuhi.

Berdasarkan pada Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pembagian urusan kesehatan mencakup upaya kesehatan, sumberdaya manusia bidang kesehatan, penyediaan farmasi dan alat kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat dalam mendukung peningkatan kualitas kesehatan.

Sebagai negara yang tidak dapat terlepas dari komunitas global, Indonesia juga telah menyepakati kelanjutan MDGs, yaitu *Sustainable Development Goals* (SDGs), yang memiliki tujuan 3 yaitu memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua untuk semua usia. Bercermin pada pelaksanaan MDGs tahun 2000-2015, beberapa hal yang perlu disoroti adalah upaya-upaya untuk menurunkan angka kematian anak, angka kematian ibu, gizi buruk dan penyediaan sanitasi dan air bersih untuk masyarakat.

Mulai tahun 2016, DPR bersama pemerintah telah sepakat untuk memenuhi mandat Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 yang mengamanatkan